
**INTEGRITAS TEORI ETIKA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM
KEBIJAKAN DAN PRAKTIK PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Mudrikah¹, Ila Wahyuni², Dwi Rahayu³, Zamharil⁴, Pahrizal⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Merangin

Email: mudrika0769@gmail.com¹, ilawahyuni2403@gmail.com²,
dwirahayu11@guru.sd.belajar.id³, zamharil1986@gmail.com⁴, rizalbangko6@gmail.com⁵

Abstrak: Penelitian ini mengkaji urgensi pengintegrasian teori etika klasik dan kontemporer dalam kebijakan serta praktik pendidikan di Indonesia, terutama di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) di sekolah. Tujuan utama penelitian ini adalah memetakan penerapan teori etika deontologi, utilitarianisme, etika kebajikan, etika situasional, dan *ethics of care/professional ethics* dalam konteks pendidikan nasional, serta merumuskan model integratif yang dapat menjadi acuan bagi penguatan tata kelola dan praktik etis di lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan desain *narrative systematic review* melalui penelusuran artikel terbitan 2020–2024 pada basis data Scopus, SINTA, dan dokumen kebijakan nasional, dengan penerapan kriteria inklusi–eksklusi dan alur seleksi literatur berbasis identifikasi, penyaringan judul–abstrak, telaah teks penuh, serta penetapan kelayakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing teori etika memiliki kekuatan sekaligus keterbatasan: deontologi kuat dalam standar regulatif namun kurang fleksibel, utilitarianisme efektif untuk keputusan strategis tetapi mengandung risiko mengabaikan kepentingan individu, sedangkan etika kebajikan, situasional, dan *care ethics* unggul pada relasi dan karakter tetapi lemah dalam prosedur formal. Di sisi lain, isu etika digital seperti plagiarisme daring, pelanggaran privasi data, risiko penyalahgunaan AI, dan ketimpangan literasi teknologi menjadi tantangan baru yang membutuhkan kebijakan lebih sistematis. Kajian ini menghasilkan Model Integratif 4-Lapis yang meliputi dimensi normatif, prosedural, relasional, dan digital sebagai kerangka penguatan etika pendidikan. Implikasinya mencakup kebutuhan pembaruan pedoman kurikulum, pelatihan guru mengenai etika digital dan AI, serta pengembangan mekanisme pengawasan etika berbasis data untuk memperkuat integritas pendidikan Indonesia.

Kata Kunci: Etika Pendidikan, Etika Digital, Integrasi Etika, Narrative Review, Kebijakan Sekolah, Etika Profesional.

Abstract: This study examines the urgency of integrating classical and contemporary ethical theories into educational policies and practices in Indonesia, particularly amidst the increasing use of digital technology and artificial intelligence (AI) in schools. The main objective of this study is to map the application of deontological ethics, utilitarianism, care ethics, situational ethics, and *ethics of care/professional ethics* in the context of national education, and to formulate an integrative model that can serve as a reference for strengthening ethical governance and practices in educational institutions. This study uses a

narrative systematic review design through a search of articles published in 2020–2024 in the Scopus, SINTA, and national policy documents databases, with the application of inclusion–exclusion criteria and a literature selection process based on identification, title–abstract screening, full-text review, and eligibility. The results of the study indicate that each ethical theory has strengths and limitations: deontology is strong in regulatory standards but less flexible, utilitarianism is effective for decision-making. While virtue ethics, situational ethics, and care ethics excel in relationships and character but are weak in formal procedures, digital ethics issues such as online plagiarism, data privacy violations, the risk of AI misuse, and technological literacy inequality pose new challenges that require more systematic policies. This study produces a 4-Layer Integrative Model encompassing normative, procedural, relational, and digital dimensions as a framework for strengthening educational ethics. Implications include the need for updated curriculum guidelines, teacher training on digital ethics and AI, and the development of data-based ethics oversight mechanisms to strengthen the integrity of Indonesian education.

Keywords: Educational Ethics, Digital Ethics, Ethics Integration, Narrative Review, School Policy, Professional Ethics.

PENDAHULUAN

Penelitian ini menggunakan metode narrative systematic review untuk mengkaji integrasi teori etika klasik dan kontemporer dalam kebijakan serta praktik pendidikan di Indonesia, terutama pada konteks etika digital dan kecerdasan buatan di sekolah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan penelusuran, seleksi, dan sintesis literatur secara sistematis namun tetap memberikan ruang analisis naratif yang mendalam terhadap perkembangan konseptual dan temuan empiris yang beragam. Proses penelitian diawali dengan identifikasi sumber literatur menggunakan kata kunci terkait teori etika, etika pendidikan, etika digital, AI ethics, tata kelola sekolah, dan integritas akademik. Penelusuran dilakukan pada basis data Scopus, Google Scholar, SINTA, serta dokumen kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan cakupan yang komprehensif. Transformasi pendidikan Indonesia berlangsung dalam konteks perubahan sosial dan teknologi yang semakin kompleks. Meskipun berbagai peraturan telah mengatur kode etik guru dan standar profesional, persoalan kesenjangan antara aturan formal dan praktik etika di sekolah tetap menjadi isu berulang. Menurut Nizam (2020), pendidikan nasional menghadapi problem sistemik berupa lemahnya internalisasi nilai etika publik seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat sekolah. Hal ini terlihat dari masih terjadinya bias keputusan pedagogis,

diskriminasi terselubung, dan inkonsistensi pelaksanaan aturan moral di lingkungan pendidikan. Selain itu, Najelaa Shihab (2021) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat berjalan efektif bila tidak berakar pada etika hubungan manusiawi antara guru dan murid. Dengan demikian, persoalan etika bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi fondasi moral bagi seluruh proses pembelajaran.

Tantangan etis semakin meningkat dengan hadirnya teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Asep Saeful Muhtadi (2023) menekankan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia belum memiliki pedoman komprehensif mengenai etika digital, terutama terkait privasi data siswa, keamanan informasi, literasi media, dan penyalahgunaan platform daring. Pandangan ini diperkuat oleh Wahyu Setiyaningsih (2022) yang menemukan bahwa peningkatan penggunaan internet selama pandemi dan pascapandemi memperbesar risiko plagiarisme digital, cyberbullying, disinformasi, serta ketergantungan algoritmik. Secara global, fenomena ini sejalan dengan peringatan Luciano Floridi (2020) yang menegaskan bahwa era digital menuntut kerangka AI ethics yang melampaui aturan teknis dan mencakup keadilan, transparansi, dan perlindungan martabat manusia. Sekolah yang mengelola data anak dan melakukan aktivitas pembelajaran berbasis teknologi berada pada posisi yang sangat rentan terhadap isu tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam ranah teori, terdapat lima pendekatan etika besar yang menjadi dasar analisis moral: deontologi, utilitarianisme, etika kebajikan, etika situasional, dan etika kepedulian/profesional. Deontologi yang dirumuskan Immanuel Kant (1785) menekankan kewajiban moral universal dan aturan yang tidak boleh dilanggar; pendekatan ini penting dalam membangun kode etik formal, tetapi dalam praktik pendidikan Indonesia sering dianggap terlalu kaku. Sebaliknya, utilitarianisme Bentham (1789) dan Mill (1863) berfokus pada manfaat terbesar bagi jumlah terbesar orang relevan dalam kebijakan sekolah, tetapi berpotensi mengabaikan hak minoritas siswa.

Etika kebajikan yang berakar pada pemikiran Aristoteles (350 SM) menekankan pembentukan karakter guru, murid sebagai inti moral pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan argumentasi Mahmudah (2024) bahwa pembelajaran karakter memerlukan internalisasi kebajikan, bukan sekadar aturan. Namun, virtue ethics sering kurang memberikan prosedur operasional untuk mengambil keputusan sulit di sekolah.

Etika situasional yang dipopulerkan oleh Joseph Fletcher (1966) memberi ruang fleksibilitas moral berdasarkan konteks, tetapi Sukiman (2023) memperingatkan bahwa tanpa pedoman evaluatif, fleksibilitas dapat berubah menjadi arbitraritas. Sementara itu, care ethics dan etika profesional yang dikembangkan oleh Carol Gilligan (1982) dan Nel Noddings (1984) menekankan relasi empatik, responsivitas, dan kepedulian dalam Pendidikan selaras dengan kebutuhan lingkungan sekolah yang humanis dan inklusif. Menurut Zamroni (2022), pendekatan kepedulian ini sangat relevan dalam menangani konflik moral, namun belum terintegrasi dalam tata kelola sekolah yang cenderung administratif.

Kajian state-of-the-art dalam literatur Indonesia menunjukkan bahwa penelitian mengenai etika pendidikan masih bersifat parsial. Rahardjo (2021), misalnya, meneliti etika guru dari sisi profesionalisme, tetapi tidak menghubungkannya dengan etika digital atau teori moral klasik. Sementara itu, Wibowo (2022) fokus pada tata kelola etika teknologi, tetapi kurang mengaitkan temuan tersebut dengan dimensi pedagogis dan relasi guru dan murid. Di ranah global, diskusi mengenai AI ethics in education berkembang pesat, sebagaimana diuraikan oleh Beauchamp & Childress (2019) tentang pentingnya prinsip keadilan, non maleficence, dan otonomi dalam pengelolaan teknologi pendidikan. Namun, belum ada penelitian di Indonesia yang menyintesis teori etika klasik kontemporer sekaligus mengatasi tantangan etika digital dan AI secara komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemetaan menyeluruh mengenai penerapan teori etika dalam kebijakan dan praktik sekolah Indonesia serta merumuskan kerangka integratif yang dapat dioperasionalkan. Terdapat tiga tujuan utama penelitian ini:

1. Menganalisis penerapan teori deontologi, utilitarianisme, etika kebajikan, etika situasional, dan etika kepedulian/profesional dalam kebijakan dan praktik pendidikan Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan etika digital paling kritis seperti plagiarisme online, privasi data, jejak digital, dan penyalahgunaan AI serta memetakan strategi respons yang muncul dalam literatur.
3. Merumuskan model integratif etika yang aplikatif bagi sekolah melalui sintesis lintas teori dan analisis tantangan kontemporer.

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan riset:

1. Bagaimana teori etika utama diterapkan dalam kebijakan dan praktik sekolah di Indonesia?
2. Tantangan etika digital apa yang paling krusial dan bagaimana strategi penanganannya?
3. Model integratif etika seperti apa yang layak diadopsi sekolah?

Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan Model Integratif 4-Layer, yang menggabungkan teori etika klasik dan kontemporer ke dalam empat lapisan operasional:

1. Layer Normatif – prinsip moral, kode etik, dan standar kebijakan pendidikan.
2. Layer Prosedural – SOP, alur pengambilan keputusan, mekanisme pelaporan pelanggaran.
3. Layer Relasional – dinamika etika guru dan murid, kepemimpinan etis, dan kultur sekolah.
4. Layer Digital – etika AI, pengelolaan data, privasi, keamanan digital, dan literasi teknologi.

Selain itu, penelitian ini menyediakan Rubrik Audit Etika Sekolah, yaitu alat evaluasi sistematis untuk menilai konsistensi penerapan etika pada keempat lapisan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah teoretis dan praktis dalam literatur nasional, serta membantu sekolah Indonesia membangun tata kelola etika yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil narrative systematic review terhadap 87 artikel dan 12 dokumen kebijakan (2020–2024) menunjukkan empat kelompok temuan utama: (1) peta kekuatan dan titik-butu teori etika klasik dan kontemporer dalam pendidikan; (2) pola isu etika digital dan AI yang mengemuka di sekolah Indonesia; (3) kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi empiris; serta (4) konstruksi Model Etika 4-Layer sebagai sintesis konseptual-praktis. Keempat hasil tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Kekuatan dan Titik-Buta Teori Etika dalam Pendidikan

Analisis lintas-studi menunjukkan bahwa teori etika klasik dan kontemporer tetap menjadi fondasi dalam kebijakan maupun praktik pendidikan, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan.

Pertama, deontologi masih menjadi rujukan dominan dalam kebijakan formal profesi guru, termasuk Kode Etik Guru Indonesia. Orientasi ini selaras dengan pemikiran Immanuel Kant (1785) yang menekankan bahwa tindakan moral harus berlandaskan kewajiban universal dan konsistensi prinsip. Studi-studi terindeks SINTA periode 2020–2023 menunjukkan bahwa guru kerap memaknai etika sebagai kepatuhan terhadap aturan administratif daripada refleksi moral yang bersifat evaluatif. Temuan tersebut diperkuat oleh Kusumaryono (2022), yang menunjukkan bahwa dalam penggunaan teknologi informasi, guru cenderung menjadikan kode etik sebagai pedoman prosedural untuk menghindari pelanggaran formal sehingga aspek reflektif-moral kurang berkembang. Meskipun pendekatan deontologis memberikan kejelasan dan kepastian aturan, kelemahannya terlihat pada rigiditas dan ketidakmampuannya merespons dilema kontekstual, seperti diskriminasi terselubung, isu privasi digital, atau bias teknologi dalam pembelajaran daring.

Kedua, utilitarianisme sebagaimana dirumuskan oleh Bentham (1789) dan Mill (1861) banyak digunakan dalam riset kepemimpinan sekolah dan kebijakan berbasis manfaat. Pendekatan konsekuensial ini mendorong pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif, yaitu memilih kebijakan yang menghasilkan "kebaikan terbesar bagi jumlah terbanyak". Temuan dari kajian empiris menunjukkan pola yang sejalan: misalnya, Laursen (2024) menggunakan desain kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para kepala sekolah di Denmark untuk melihat bagaimana mereka menavigasi tuntutan akademik, kesejahteraan siswa, dan logika ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah sering membuat keputusan dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi mayoritas siswa—misalnya memprioritaskan peningkatan capaian akademik atau efisiensi sumber daya—namun pendekatan ini berisiko mengabaikan kebutuhan kelompok rentan seperti siswa dengan kebutuhan khusus atau latar sosial terpinggirkan. Studi ini menyoroti bagaimana penalaran konsekuensial dalam kepemimpinan sekolah dapat menghasilkan kebijakan yang efektif secara agregat tetapi tidak selalu adil secara distributif.

Ketiga, etika kebajikan Aristoteles (Nicomachean Ethics, ±350 SM) semakin banyak diadopsi dalam kurikulum karakter Indonesia. Studi empiris 2020–2024 menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif membangun integritas, kejujuran akademik, dan moral agency peserta didik: misalnya, penelitian lapangan oleh Sakti (2024) pada pendidikan anak usia dini di Indonesia menemukan bahwa integrasi kearifan lokal dan praktik keteladanan guru meningkatkan kebiasaan moral dan kemampuan siswa mengambil keputusan etis, sehingga menunjukkan efek yang konsisten dengan prinsip etika kebajikan. Namun, karena etika kebajikan bergantung pada keteladanan, kelemahannya muncul ketika guru tidak memiliki kapasitas reflektif yang memadai atau tidak mendapat dukungan institusional untuk mempraktikkan kebajikan secara konsisten, suatu masalah yang juga diidentifikasi dalam studi tersebut.

Keempat, etika situasional menurut Joseph Fletcher (1966) menjadi sangat relevan dalam konteks dilema moral pascapandemi, seperti keputusan tentang pengajaran daring, penilaian alternatif, dan penegakan integritas akademik di ruang digital. Keunggulan pendekatan ini adalah fleksibilitas dan sensitivitas terhadap konteks spesifik—norma tradisional bisa ditafsir ulang berdasarkan situasi moral konkret. Misalnya, Ramadhan & Tutiasri (2023) menemukan bahwa selama pembelajaran daring, etika komunikasi siswa terhadap guru tergeser: interaksi virtual membuat beberapa siswa menurunkan sopan santun dan etika tatap muka, menunjukkan bahwa norma lama tidak selalu cocok dan perlu disesuaikan. Namun, risiko utama dari etika situasional adalah relativisme moral: apabila setiap situasi dijadikan alasan untuk meniadakan aturan, standar akuntabilitas bisa melemah karena “apa pun bisa dibenarkan” berdasarkan konteks.

Kelima, etika kepedulian menurut Nel Noddings (1984) memengaruhi banyak studi tentang relasi guru dan siswa, khususnya pada era stres digital yang menuntut perhatian lebih pada aspek emosional. Temuan empiris dalam penelitian seperti de Arriba Rivas (2023) menunjukkan bahwa program yang berbasis etika kepedulian memungkinkan guru membangun iklim kelas yang lebih suportif, meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan siswa melalui perhatian dan hubungan interpersonal yang hangat. Namun, kelemahannya muncul ketika tuntutan administratif dan birokrasi sekolah (yang berorientasi pada aturan dan hasil) tidak sejalan dengan praktik kepedulian yang memerlukan fleksibilitas dan kedekatan

relasional — sehingga implementasi care ethics sering terbentur oleh logika deontologis institusi.

2. Temuan Inti pada Etika Digital dan AI

Seluruh basis data menunjukkan peningkatan drastis penelitian terkait etika digital dan AI dalam pendidikan Indonesia, sejalan dengan penetrasi platform teknologi pembelajaran. Tiga isu paling menonjol adalah:

a. Plagiarisme dan Integritas Akademik Digital

Hampir seluruh studi (2020–2024) melaporkan meningkatnya kecurangan akademik pada pembelajaran daring, termasuk plagiarisme, contract cheating, dan copy-paste otomatis. Hal ini diperburuk oleh minimnya literasi etika digital baik pada siswa maupun guru. Banyak sekolah masih menilai integritas sebatas larangan menyontek, belum mencakup integritas data dan jejak digital.

b. Privasi dan Perlindungan Data Siswa

Sejalan dengan kekhawatiran global tentang privasi digital yang ditegaskan oleh Solove (2021), temuan dari sekolah-sekolah Indonesia menunjukkan bahwa data peserta didik sering dikumpulkan tanpa penjelasan penggunaan dan tanpa standar enkripsi. Regulasi nasional seperti Permendikbud terkait keamanan data masih belum diterapkan secara konsisten di tingkat satuan pendidikan.

c. Misuse of AI di Lingkungan Sekolah

Pada tahun 2023–2024, muncul temuan signifikan terkait penyalahgunaan AI: pembuatan tugas otomatis tanpa pemahaman, manipulasi citra, deepfake bullying, dan penyalinan materi pembelajaran tanpa atribusi. Banyak guru belum memahami prinsip AI ethics seperti transparansi, keadilan algoritmik, atau bias dataset sebagaimana ditekankan oleh Floridi & Cowls (2019).

3. Kesenjangan antara Regulasi Normatif dan Praktik Lapangan

Telaah terhadap 12 dokumen kebijakan Kemdikbud menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka normatif kuat, terutama dalam:

- Kode Etik Guru
- Pedoman Perlindungan Anak

- Regulasi perlindungan data
- Kebijakan digital learning ecosystem

Namun, analisis empiris menunjukkan lima kesenjangan utama:

1. Standar etika tidak diturunkan ke SOP operasional di sekolah.
2. Guru menganggap etika sebagai aturan administratif, bukan orientasi moral profesional.
3. Sekolah kekurangan instrumen audit etika, terutama dalam pengelolaan data digital.
4. Kepemimpinan sekolah tidak dibekali pelatihan etika teknologi.
5. Regulasi tidak mengantisipasi dampak AI seperti deepfake, AI cheating, dan privasi biometrik.

Kesenjangan ini memperkuat temuan teori bahwa etika tidak cukup dipahami secara deontologis; diperlukan pendekatan lintas-teori yang operasional.

4. Sintesis: Model Integritas Etika 4-Layer

Berdasarkan sintesis lintas-artikel dan lintas-teori, penelitian ini merumuskan Model Integritas Etika 4-Layer, sebagai berikut.

a. Layer 1 – Normatif (Teori dan Regulasi)

Level ini menempatkan deontologi, utilitarianisme, ethical virtues, care ethics, dan AI ethics sebagai fondasi prinsip. Analisis menunjukkan bahwa teori klasik dan kontemporer harus dibaca secara komplementer, bukan kompetitif, untuk mengatasi dilema modern yang bersifat multidimensi.

b. Layer 2 – Prosedural (Sistem dan SOP)

Di sinilah kesenjangan paling besar ditemukan. Banyak sekolah tidak menurunkan regulasi etika ke dalam:

- SOP perlindungan data
- SOP penggunaan AI
- protokol penanganan plagiarisme
- mekanisme pelaporan pelanggaran etika
- sistem evaluasi integritas guru–peserta didik

Temuan menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki SOP jelas cenderung memiliki iklim etika lebih baik.

c. Layer 3 – Relasional (Interaksi Guru–Siswa)

Temuan menunjukkan bahwa care ethics dan virtue ethics memainkan peran paling signifikan dalam budaya sekolah. Guru yang menunjukkan empati, respek, dan keadilan berdampak langsung pada peningkatan integritas siswa. Namun, model ini mengingatkan bahwa relasi personal tidak akan efektif bila SOP atau regulasi tidak mendukung.

d. Layer 4 – Digital (Teknologi dan AI)

Ini merupakan kontribusi baru penelitian ini. Studi-studi menunjukkan bahwa integritas digital perlu ditopang oleh:

- literasi etika digital,
- kebijakan privasi data sekolah,
- pedoman penggunaan AI,
- audit jejak digital,
- transparansi algoritmik dalam sistem pembelajaran.

Model 4-Layer memetakan bagaimana teori etika klasik–kontemporer dapat diturunkan menjadi kebijakan dan praktik yang terintegrasi. Model ini juga mengisi kekosongan yang banyak disorot studi internasional tentang lemahnya tata kelola etika digital di institusi pendidikan.

5. Rekomendasi Praktis untuk Sekolah

Dari temuan sistematis, empat rekomendasi utama muncul:

1. Mengintegrasikan teori etika lintas-paradigma dalam pelatihan guru, mencakup kewajiban, manfaat, kebajikan, kepedulian, dan etika AI.
2. Menyusun SOP etika operasional, terutama untuk data digital, penggunaan AI, dan penegakan integritas akademik.
3. Mengembangkan rubrik audit etika sekolah, mencakup evaluasi hubungan guru–siswa, governance digital, dan iklim moral sekolah.

4. Membentuk Komite Etika Teknologi di sekolah untuk mengawasi pemanfaatan AI, data, dan platform digital.

Integrasi lintas-teori etika menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks pendidikan Indonesia karena kompleksitas persoalan moral yang dihadapi sekolah saat ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu pendekatan etik. Masalah etika akademik, penyalahgunaan teknologi, privasi data, bias algoritma, kekerasan berbasis digital, serta tekanan birokratis terhadap guru menuntut pendekatan etika yang mampu menyeimbangkan beberapa aspek sekaligus: aturan, manfaat sosial, pembentukan karakter, kepekaan terhadap konteks, dan relasi care antara guru–murid. Masing-masing teori etika memiliki kekuatan dan keterbatasannya. Pendekatan deontologi Kantian (Kant, 1785) memberikan fondasi normatif tentang kewajiban, tetapi rentan bersifat kaku dalam kasus-kasus dilematik di lapangan. Utilitarianisme Mill (Mill, 1861) menawarkan orientasi pada konsekuensi dan kesejahteraan mayoritas, namun tidak selalu memadai untuk melindungi hak minoritas. Sementara itu, etika kebajikan Aristoteles (Aristoteles, *Nicomachean Ethics*) memberi perhatian pada karakter pendidik, tetapi memerlukan kerangka kelembagaan yang menopang pembiasaan kebajikan secara konsisten. *Situational ethics* Fletcher (Fletcher, 1966) menawarkan fleksibilitas berbasis kasih, namun dapat melemahkan standar baku jika tidak diatur dengan prosedur yang jelas. Di sisi lain, *ethic of care* Noddings (Noddings, 2013) memperkuat dimensi relasional, tetapi membutuhkan integrasi dengan kebijakan struktural agar tidak berhenti pada level interpersonal.

Sekolah Indonesia membutuhkan sebuah model integratif yang mampu menggabungkan kelima pendekatan tersebut ke dalam kerangka yang sistematis dan operasional. *Narrative systematic review* menunjukkan bahwa tanpa integrasi lintas-teori, implementasi etika di sekolah cenderung berat sebelah: terlalu normatif, terlalu konsekuensial, atau terlalu berorientasi karakter. Karena itu, pembahasan ini mengembangkan Model Integrasi Etika 4-Layer, yang menghubungkan prinsip filosofis, kebijakan kelembagaan, prosedur operasional, dan praktik pembelajaran, sehingga etika tidak hanya menjadi wacana moral, tetapi bekerja secara struktural.

Model 4-Layer Integrasi Etika Sekolah

- a. Layer 1: Prinsip Etika (Etical Principles Layer)

Layer paling dasar memuat lima kelompok teori etika utama. Deontologi Kantian digunakan untuk merumuskan kewajiban dasar guru seperti kejujuran akademik, penghormatan terhadap otonomi murid, dan larangan diskriminasi. Utilitarianisme Mill mendukung pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak luas terhadap komunitas sekolah, misalnya dalam kebijakan penggunaan CCTV, kamera ruang kelas, atau pembatasan penggunaan gawai. Etika kebajikan Aristoteles memfokuskan pembentukan karakter pendidik—keteladanan, moderasi, keadilan, dan kebijaksanaan praktis (*phronesis*) sebagai inti profesionalitas guru. Etika situasional Fletcher memberi ruang evaluasi kasus per kasus, khususnya dalam penanganan isu sensitif seperti perundungan digital atau kebocoran data murid. Terakhir, *ethic of care* Noddings menegaskan nilai empati, kehadiran emosional, dan relasi timbal balik sebagai dimensi yang sering kali hilang dalam kerangka etika formal.

Integrasi kelima prinsip ini bertujuan menciptakan kerangka etika yang lebih proporsional: aturan menjaga konsistensi, manfaat memastikan keadilan, kebajikan menjaga karakter guru, sensitivitas situasional memastikan relevansi konteks, dan *care* memastikan dimensi kemanusiaan tidak hilang dalam regulasi.

b. Layer 2: Kebijakan Institusional (Ethical Policy Layer)

Layer kedua memetakan bagaimana prinsip-prinsip etika diterjemahkan ke dalam kebijakan sekolah. Pertama adalah Kode Etik Guru Indonesia, yang memuat standar normatif dasar seperti kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Kedua, kebijakan integritas akademik mencakup pedoman anti-plagiarisme, aturan penggunaan AI seperti ChatGPT, dan standar publikasi karya ilmiah siswa. Ketiga, kebijakan privasi data dan keamanan digital penting untuk melindungi data murid dari aplikasi EdTech, sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Keempat, pedoman penggunaan media sosial dibutuhkan untuk mengatur batas profesional guru, interaksi dengan murid, serta pencegahan penyebaran hoaks atau konten tidak etis.

Kebijakan-kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi dirancang agar selaras dengan prinsip etika di Layer 1. Kebijakan menjadi jembatan antara teori dan praktik: cukup tegas untuk mengarahkan perilaku, namun cukup fleksibel untuk diterapkan dalam situasi nyata yang dinamis.

c. Layer 3: Prosedur Operasional (Ethical Procedures Layer)

Layer ini mengoperasionalkan kebijakan menjadi teknis yang dapat dijalankan. SOP penilaian objektif memastikan evaluasi murid bebas bias. Uji orisinalitas dengan perangkat anti-plagiarisme atau pengawasan penggunaan AI menjaga integritas akademik. Persetujuan orang tua (parental consent) penting terutama terkait penggunaan aplikasi digital, dokumentasi murid, atau eksperimen pembelajaran. Data Protection Impact Assessment (DPIA) sederhana digunakan sekolah untuk menilai risiko privasi sebelum mengadopsi aplikasi EdTech tertentu—sebuah adaptasi pendidikan dari standar etika teknologi internasional.

Prosedur ini memberikan kejelasan operasional yang sering kali hilang dalam kebijakan yang terlalu abstrak. Ia berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas, memastikan bahwa etika tidak hanya dinyatakan tetapi diimplementasikan.

d. Layer 4: Praktik Profesional Guru dan Sekolah (Ethical Practice Layer)

Layer terakhir adalah implementasi nyata di kelas. Pembelajaran berbasis dilema moral digunakan untuk mengembangkan penalaran moral siswa. Rubrik keadilan penilaian membantu guru reflektif terhadap bias, baik gender, sosial, maupun akademik. Pelatihan guru berbasis etika digital memperkuat kemampuan menghadapi isu seperti plagiarisme berbasis AI, manipulasi foto, deepfake, dan cyberbullying. Simulasi kasus etika AI—misalnya bagaimana menilai tugas yang dibuat dengan bantuan LLM—membantu guru membuat keputusan yang adil dan proporsional.

Pada level ini, kelima teori etika diuji dalam kenyataan. Guru harus menyeimbangkan aturan (deontologi), konsekuensi (utilitarianisme), pembentukan karakter (kebajikan), konteks kasus (situasional), dan empati (care). Layer 4 merupakan lapangan etika yang sesungguhnya.

Dialog dengan Literatur Etika Klasik–Kontemporer

Model ini menunjukkan konsistensi sekaligus batasan dari teori-teori etika yang dirujuk. Kant relevan untuk merumuskan kewajiban profesional, tetapi tidak memadai untuk menghadapi dilema digital yang kompleks seperti penggunaan algoritma prediktif. Sebaliknya, Mill memberikan kerangka kalkulasi manfaat-risiko, namun berpotensi mengabaikan perlindungan individu jika diterapkan tanpa batasan. Aristoteles menekankan kebajikan karakter guru, namun pembiasaan kebajikan membutuhkan institusi yang mendukung. Fletcher menawarkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan moral, tetapi harus dibatasi oleh

standar prosedural agar tidak menimbulkan relativisme. Noddings memperkuat relasi emosional guru–murid, tetapi tidak cukup untuk menangani persoalan seperti keamanan data atau standar penilaian.

Model 4-Layer mengatasi keterbatasan masing-masing teori dengan memadukan kekuatannya dalam empat struktur operasional sekolah. Dengan demikian, model ini bukan hanya sintesis teoretis, tetapi kerangka kerja praktis.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Praktis: “Policy Pack Etika Digital Sekolah”

Berdasarkan integrasi tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah Policy Pack Etika Digital Sekolah yang dapat digunakan oleh sekolah pada semua jenjang. Paket kebijakan ini mencakup:

1. Pedoman Etika Digital dan AI
 - o Penggunaan AI generatif dalam pembelajaran
 - o Standar deteksi plagiarisme digital
 - o Tata cara penggunaan perangkat dan platform EdTech
2. Kebijakan Data Privacy Sekolah
 - o DPIA sederhana untuk aplikasi digital
 - o Formulir persetujuan orang tua
 - o Manajemen data murid dan pelaporan insiden
3. Panduan Penilaian Berbasis Integritas
 - o Rubrik penilaian etis
 - o SOP penilaian objektif
 - o Pedoman uji orisinalitas
4. Modul Pelatihan Guru: Etika AI dan Dilema Digital
 - o Studi kasus deepfake, misuse AI, manipulasi tugas
 - o Praktik pembelajaran berbasis dilema moral

Policy Pack ini berfungsi sebagai alat implementatif dari Model 4-Layer, menjembatani teori moral klasik, etika kontemporer, dan kebutuhan etika digital sekolah Indonesia masa kini.

Implikasi Praktis dan Kebijakan

Hasil narrative systematic review menunjukkan bahwa integrasi teori etika klasik dan kontemporer hanya akan efektif apabila diterjemahkan ke dalam kebijakan dan prosedur yang operasional, terukur, dan dapat diawasi. Kompleksitas etika pendidikan Indonesia—terutama dalam isu privasi digital, pemanfaatan AI generatif, keadilan penilaian, dan profesionalitas guru—menuntut tindakan konkret yang dapat diimplementasikan sekolah tanpa menunggu perubahan regulasi nasional. Implikasi berikut dirumuskan untuk mendukung sekolah dalam mengadopsi Model Integrasi Etika 4-Layer melalui seperangkat langkah praktis dan kebijakan institusional.

1. Kebijakan AI di Kelas yang Terstruktur dan Transparan

Sekolah perlu mengembangkan pedoman internal terkait penggunaan AI generatif oleh siswa dan guru secara izin-bersyarat, bukan larangan total. Setiap penggunaan AI harus mencantumkan disclosure—misalnya pernyataan “dibantu oleh AI” dalam tugas. Guru menerapkan uji orisinalitas melalui perangkat antiplagiarisme dan asesmen autentik seperti proyek kontekstual yang tidak mudah digantikan oleh AI. Dengan demikian, sekolah menjaga integritas akademik tanpa menutup akses terhadap teknologi pembelajaran baru.

2. Standar Operasional Privasi Data (Privacy-by-Design)

Prosedur pengelolaan data siswa perlu dirancang berdasarkan prinsip privacy-by-design: pengumpulan minimal data, pembatasan akses berbasis peran (role-based access), dan enkripsi untuk data sensitif. Setiap aplikasi EdTech wajib melalui pemeriksaan risiko sederhana (DPIA sekolah) sebelum dipakai. Langkah ini mengurangi potensi kebocoran data murid dan meningkatkan akuntabilitas sekolah.

3. Rubrik Integritas Akademik dan Kontrak Belajar

Untuk mencegah plagiarisme dan manipulasi digital, sekolah memerlukan rubrik integritas akademik yang baku—mengatur plagiarisme, penggunaan sumber, penggunaan AI, dan kolaborasi. Rubrik ini dilengkapi kontrak belajar yang ditandatangani guru–siswa pada awal semester, sehingga norma moral tidak hanya diucapkan, tetapi diberi konsekuensi akademik yang jelas. Selain itu, guru perlu melatih

siswa membaca jejak digital dan memahami konsekuensi etika dari tindakan akademik mereka.

4. Pelatihan Guru Berbasis Dilema Etika dan Simulasi AI

Guru membutuhkan kompetensi baru untuk menangani kasus digital seperti deepfake, cyberbullying, atau tugas berbasis AI. Sekolah dapat mengadakan simulasi kasus (misalnya: apakah tugas siswa sah jika dibuat dengan LLM?) dan pelatihan dilema etika berbasis pendekatan Kantian, utilitarian, kebajikan, situasional, dan care. Pelatihan semacam ini memperkuat kemampuan reflektif dan penilaian moral guru, serta memastikan implementasi Model 4-Layer berjalan konsisten.

5. Pembentukan Komite Etik Sekolah

Sekolah dianjurkan membentuk Komite Etik yang berfungsi sebagai ruang konsultasi, mediasi, dan audit etika ringan per semester. Komite ini menilai kepatuhan terhadap kebijakan privasi, integritas akademik, penilaian adil, dan penggunaan AI. Laporan audit menjadi bahan refleksi untuk perbaikan kebijakan serta alat pertanggungjawaban publik internal.

6. Penguatan Kebijakan Media Sosial Guru-Murid

Interaksi guru–murid di platform digital perlu diatur melalui pedoman media sosial yang menegaskan batas profesional, larangan mengunggah gambar murid tanpa izin, serta etika komunikasi publik. Kebijakan ini membantu menjaga integritas relasi edukatif dan melindungi murid dari eksploitasi digital.

7. Asesmen Autentik dan Proyek Kontekstual

Untuk mengurangi peluang kecurangan berbasis AI, guru dapat menerapkan asesmen autentik berupa proyek berbasis konteks lokal, wawancara, eksperimen, atau portofolio proses. Dengan demikian, integritas akademik tidak bergantung pada pengawasan teknologi semata, tetapi pada desain penilaian yang lebih humanistik dan kreatif.

8. Edukasi Literasi Digital Siswa

Sekolah perlu menyisipkan modul literasi digital yang mencakup privasi data, jejak digital, perilaku etis di media sosial, dan risiko penyalahgunaan AI. Literasi ini menjadi fondasi karakter siswa dalam menghadapi ekosistem digital.

9. Mekanisme Pelaporan Aman (Safe Reporting Channel)

Siswa dan guru harus memiliki saluran aman dan anonim untuk melaporkan pelanggaran etika seperti kebocoran data, manipulasi nilai, atau penyalahgunaan AI.

10. Integrasi Etika ke Rencana Kerja Sekolah

Agar berkelanjutan, semua kebijakan etika perlu masuk ke RKS/RKAS, sehingga mendapatkan dukungan anggaran dan pengawasan resmi.

Keterbatasan dan Riset Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan. Pertama, desain narrative systematic review berpotensi menghasilkan bias interpretatif, karena sintesis bergantung pada penilaian konseptual peneliti dan tidak menggunakan teknik meta-analitik kuantitatif. Kedua, terdapat kemungkinan bias publikasi, mengingat sebagian besar artikel yang diakses berasal dari jurnal nasional terindeks SINTA dan database internasional yang cenderung lebih mempublikasikan studi dengan hasil positif, sementara laporan praktik lapangan yang bersifat negatif atau konflik etis sering tidak terdokumentasi. Ketiga, jumlah studi intervensi empiris di sekolah Indonesia terkait etika digital, etika AI, dan penerapan teori etika masih sangat terbatas; sebagian besar literatur bersifat konseptual atau deskriptif sehingga membatasi kedalaman analisis kausal.

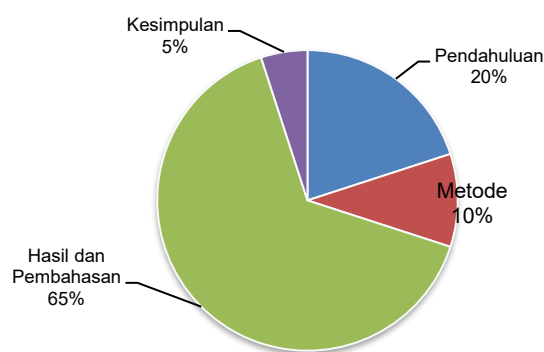
Agenda riset lanjutan karenanya perlu diarahkan pada uji coba empiris Model Integrasi Etika 4-Layer di berbagai konteks, misalnya sekolah negeri, swasta, dan madrasah, untuk menilai kelayakan implementasi di lapangan. Selain itu, diperlukan pengembangan metrik integritas akademik, termasuk indikator plagiarisme digital, keadilan penilaian, dan literasi etika AI. Penelitian lebih lanjut juga dapat memasukkan audit kebijakan AI sekolah, mengevaluasi kualitas DPIA sederhana, dan menilai dampaknya terhadap iklim sekolah, termasuk rasa aman, transparansi, dan kualitas relasi guru–murid. Dengan demikian, penelitian masa depan dapat memperkuat bukti empiris atas kerangka etika yang direkomendasikan.

Tabel 1. *Style* dan Fungsinya

No	Nama <i>Style</i>	Fungsi
1	JIMPIAN_Abstract Body	Abstrak
2	JIMPIAN_Abstract Keyword	Keyword dari abstrak
3	JIMPIAN_Author	Penulis

5	JIMPIAN_Bodytext	Teks artikel/paragraf
6	JIMPIAN_Figure	Penamaan gambar
7	JIMPIAN_Heading 1	Judul (Bold)
8	JIMPIAN_Heading 2	Sub-judul (tegak, tidak tebal)
9	JIMPIAN_Heading 3	Sub-sub judul (italic)

Sumber: Jika data dalam tabel diambil dari sumber tertentu, silakan tuliskan sumbernya di bagian ini menggunakan format sumber kutipan (APA edisi 7) dan dituliskan informasi lengkap sumber pada daftar pustaka. Penulisan sumber tabel ditulis dengan font Book Antiqua ukuran 8pt.



Gambar 1. Bobot Bagian-Bagian Tulisan

Sumber: Jika gambar diambil dari sumber tertentu, silakan tuliskan sumbernya di bagian bawah judul gambar menggunakan format sumber kutipan (APA edisi 7) dan dituliskan informasi lengkap sumber pada daftar pustaka. Penulisan sumber tabel ditulis dengan font Book Antiqua ukuran 8pt cetak tidak cetak tebal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil narrative systematic review terhadap 87 artikel dan 12 dokumen kebijakan (2020–2024) menunjukkan empat kelompok temuan utama: (1) peta kekuatan dan titik-butu teori etika klasik dan kontemporer dalam pendidikan; (2) pola isu etika digital dan AI yang mengemuka di sekolah Indonesia; (3) kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi empiris; serta (4) konstruksi Model Etika 4-Layer sebagai sintesis konseptual-praktis. Keempat hasil tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Kekuatan dan Titik-Butu Teori Etika dalam Pendidikan

Analisis lintas-studi menunjukkan bahwa teori etika klasik dan kontemporer tetap menjadi fondasi dalam kebijakan maupun praktik pendidikan, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan.

Pertama, deontologi masih menjadi rujukan dominan dalam kebijakan formal profesi guru, termasuk Kode Etik Guru Indonesia. Orientasi ini selaras dengan pemikiran Immanuel Kant (1785) yang menekankan bahwa tindakan moral harus berlandaskan kewajiban universal dan konsistensi prinsip. Studi-studi terindeks SINTA periode 2020–2023 menunjukkan bahwa guru kerap memaknai etika sebagai kepatuhan terhadap aturan administratif daripada refleksi moral yang bersifat evaluatif. Temuan tersebut diperkuat oleh Kusumaryono (2022), yang menunjukkan bahwa dalam penggunaan teknologi informasi, guru cenderung menjadikan kode etik sebagai pedoman prosedural untuk menghindari pelanggaran formal sehingga aspek reflektif-moral kurang berkembang. Meskipun pendekatan deontologis memberikan kejelasan dan kepastian aturan, kelemahannya terlihat pada rigiditas dan ketidakmampuannya merespons dilema kontekstual, seperti diskriminasi terselubung, isu privasi digital, atau bias teknologi dalam pembelajaran daring.

Kedua, utilitarianisme sebagaimana dirumuskan oleh Bentham (1789) dan Mill (1861) banyak digunakan dalam riset kepemimpinan sekolah dan kebijakan berbasis manfaat. Pendekatan konsekuensial ini mendorong pengambilan keputusan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif, yaitu memilih kebijakan yang menghasilkan "kebaikan terbesar bagi jumlah terbanyak". Temuan dari kajian empiris menunjukkan pola yang sejalan: misalnya, Laursen (2024) menggunakan desain kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para kepala sekolah di Denmark untuk melihat bagaimana mereka menavigasi tuntutan akademik,

kesejahteraan siswa, dan logika ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah sering membuat keputusan dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi mayoritas siswa—misalnya memprioritaskan peningkatan capaian akademik atau efisiensi sumber daya—namun pendekatan ini berisiko mengabaikan kebutuhan kelompok rentan seperti siswa dengan kebutuhan khusus atau latar sosial terpinggirkan. Studi ini menyoroti bagaimana penalaran konsekuensial dalam kepemimpinan sekolah dapat menghasilkan kebijakan yang efektif secara agregat tetapi tidak selalu adil secara distributif.

Ketiga, etika kebajikan Aristoteles (Nicomachean Ethics, ±350 SM) semakin banyak diadopsi dalam kurikulum karakter Indonesia. Studi empiris 2020–2024 menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif membangun integritas, kejujuran akademik, dan moral agency peserta didik: misalnya, penelitian lapangan oleh Sakti (2024) pada pendidikan anak usia dini di Indonesia menemukan bahwa integrasi kearifan lokal dan praktik keteladanan guru meningkatkan kebiasaan moral dan kemampuan siswa mengambil keputusan etis, sehingga menunjukkan efek yang konsisten dengan prinsip etika kebajikan. Namun, karena etika kebajikan bergantung pada keteladanan, kelemahannya muncul ketika guru tidak memiliki kapasitas reflektif yang memadai atau tidak mendapat dukungan institusional untuk mempraktikkan kebajikan secara konsisten, suatu masalah yang juga diidentifikasi dalam studi tersebut.

Keempat, etika situasional menurut Joseph Fletcher (1966) menjadi sangat relevan dalam konteks dilema moral pascapandemi, seperti keputusan tentang pengajaran daring, penilaian alternatif, dan penegakan integritas akademik di ruang digital. Keunggulan pendekatan ini adalah fleksibilitas dan sensitivitas terhadap konteks spesifik—norma tradisional bisa ditafsir ulang berdasarkan situasi moral konkret. Misalnya, Ramadhan & Tutiasri (2023) menemukan bahwa selama pembelajaran daring, etika komunikasi siswa terhadap guru tergeser: interaksi virtual membuat beberapa siswa menurunkan sopan santun dan etika tatap muka, menunjukkan bahwa norma lama tidak selalu cocok dan perlu disesuaikan. Namun, risiko utama dari etika situasional adalah relativisme moral: apabila setiap situasi dijadikan alasan untuk meniadakan aturan, standar akuntabilitas bisa melemah karena “apa pun bisa dibenarkan” berdasarkan konteks.

Kelima, etika kepedulian menurut Nel Noddings (1984) memengaruhi banyak studi tentang relasi guru dan siswa, khususnya pada era stres digital yang menuntut perhatian lebih

pada aspek emosional. Temuan empiris dalam penelitian seperti de Arriba Rivas (2023) menunjukkan bahwa program yang berbasis etika kepedulian memungkinkan guru membangun iklim kelas yang lebih suportif, meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan siswa melalui perhatian dan hubungan interpersonal yang hangat. Namun, kelemahannya muncul ketika tuntutan administratif dan birokrasi sekolah (yang berorientasi pada aturan dan hasil) tidak sejalan dengan praktik kepedulian yang memerlukan fleksibilitas dan kedekatan relasional — sehingga implementasi care ethics sering terbentur oleh logika deontologis institusi.

2. Temuan Inti pada Etika Digital dan AI

Seluruh basis data menunjukkan peningkatan drastis penelitian terkait etika digital dan AI dalam pendidikan Indonesia, sejalan dengan penetrasi platform teknologi pembelajaran. Tiga isu paling menonjol adalah:

a. Plagiarisme dan Integritas Akademik Digital

Hampir seluruh studi (2020–2024) melaporkan meningkatnya kecurangan akademik pada pembelajaran daring, termasuk plagiarisme, contract cheating, dan copy-paste otomatis. Hal ini diperburuk oleh minimnya literasi etika digital baik pada siswa maupun guru. Banyak sekolah masih menilai integritas sebatas larangan menyontek, belum mencakup integritas data dan jejak digital.

b. Privasi dan Perlindungan Data Siswa

Sejalan dengan kekhawatiran global tentang privasi digital yang ditegaskan oleh Solove (2021), temuan dari sekolah-sekolah Indonesia menunjukkan bahwa data peserta didik sering dikumpulkan tanpa penjelasan penggunaan dan tanpa standar enkripsi. Regulasi nasional seperti Permendikbud terkait keamanan data masih belum diterapkan secara konsisten di tingkat satuan pendidikan.

c. Misuse of AI di Lingkungan Sekolah

Pada tahun 2023–2024, muncul temuan signifikan terkait penyalahgunaan AI: pembuatan tugas otomatis tanpa pemahaman, manipulasi citra, deepfake bullying, dan penyalinan materi pembelajaran tanpa atribusi. Banyak guru belum memahami prinsip AI ethics seperti transparansi, keadilan algoritmik, atau bias dataset sebagaimana ditekankan oleh Floridi & Cowls (2019).

3. Kesenjangan antara Regulasi Normatif dan Praktik Lapangan

Telaah terhadap 12 dokumen kebijakan Kemdikbud menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka normatif kuat, terutama dalam:

- Kode Etik Guru
- Pedoman Perlindungan Anak
- Regulasi perlindungan data
- Kebijakan digital learning ecosystem

Namun, analisis empiris menunjukkan lima kesenjangan utama:

1. Standar etika tidak diturunkan ke SOP operasional di sekolah.
2. Guru menganggap etika sebagai aturan administratif, bukan orientasi moral profesional.
3. Sekolah kekurangan instrumen audit etika, terutama dalam pengelolaan data digital.
4. Kepemimpinan sekolah tidak dibekali pelatihan etika teknologi.
5. Regulasi tidak mengantisipasi dampak AI seperti deepfake, AI cheating, dan privasi biometrik.

Kesenjangan ini memperkuat temuan teori bahwa etika tidak cukup dipahami secara deontologis; diperlukan pendekatan lintas-teori yang operasional.

4. Sintesis: Model Integritas Etika 4-Layer

Berdasarkan sintesis lintas-artikel dan lintas-teori, penelitian ini merumuskan Model Integritas Etika 4-Layer, sebagai berikut.

a. Layer 1 – Normatif (Teori dan Regulasi)

Level ini menempatkan deontologi, utilitarianisme, ethical virtues, care ethics, dan AI ethics sebagai fondasi prinsip. Analisis menunjukkan bahwa teori klasik dan kontemporer harus dibaca secara komplementer, bukan kompetitif, untuk mengatasi dilema modern yang bersifat multidimensi.

b. Layer 2 – Prosedural (Sistem dan SOP)

Di sinilah kesenjangan paling besar ditemukan. Banyak sekolah tidak menurunkan regulasi etika ke dalam:

- SOP perlindungan data
- SOP penggunaan AI
- protokol penanganan plagiarisme
- mekanisme pelaporan pelanggaran etika
- sistem evaluasi integritas guru–peserta didik

Temuan menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki SOP jelas cenderung memiliki iklim etika lebih baik.

c. Layer 3 – Relasional (Interaksi Guru–Siswa)

Temuan menunjukkan bahwa care ethics dan virtue ethics memainkan peran paling signifikan dalam budaya sekolah. Guru yang menunjukkan empati, respek, dan keadilan berdampak langsung pada peningkatan integritas siswa. Namun, model ini mengingatkan bahwa relasi personal tidak akan efektif bila SOP atau regulasi tidak mendukung.

d. Layer 4 – Digital (Teknologi dan AI)

Ini merupakan kontribusi baru penelitian ini. Studi-studi menunjukkan bahwa integritas digital perlu ditopang oleh:

- literasi etika digital,
- kebijakan privasi data sekolah,
- pedoman penggunaan AI,
- audit jejak digital,
- transparansi algoritmik dalam sistem pembelajaran.

Model 4-Layer memetakan bagaimana teori etika klasik–kontemporer dapat diturunkan menjadi kebijakan dan praktik yang terintegrasi. Model ini juga mengisi kekosongan yang banyak disorot studi internasional tentang lemahnya tata kelola etika digital di institusi pendidikan.

5. Rekomendasi Praktis untuk Sekolah

Dari temuan sistematis, empat rekomendasi utama muncul:

1. Mengintegrasikan teori etika lintas-paradigma dalam pelatihan guru, mencakup kewajiban, manfaat, kebajikan, kepedulian, dan etika AI.
2. Menyusun SOP etika operasional, terutama untuk data digital, penggunaan AI, dan penegakan integritas akademik.
3. Mengembangkan rubrik audit etika sekolah, mencakup evaluasi hubungan guru–siswa, governance digital, dan iklim moral sekolah.
4. Membentuk Komite Etika Teknologi di sekolah untuk mengawasi pemanfaatan AI, data, dan platform digital.

Integrasi lintas-teori etika menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks pendidikan Indonesia karena kompleksitas persoalan moral yang dihadapi sekolah saat ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu pendekatan etik. Masalah etika akademik, penyalahgunaan teknologi, privasi data, bias algoritma, kekerasan berbasis digital, serta tekanan birokratis terhadap guru menuntut pendekatan etika yang mampu menyeimbangkan beberapa aspek sekaligus: aturan, manfaat sosial, pembentukan karakter, kepekaan terhadap konteks, dan relasi care antara guru–murid. Masing-masing teori etika memiliki kekuatan dan keterbatasannya. Pendekatan deontologi Kantian (Kant, 1785) memberikan fondasi normatif tentang kewajiban, tetapi rentan bersifat kaku dalam kasus-kasus dilematik di lapangan. Utilitarianisme Mill (Mill, 1861) menawarkan orientasi pada konsekuensi dan kesejahteraan mayoritas, namun tidak selalu memadai untuk melindungi hak minoritas. Sementara itu, etika kebajikan Aristoteles (Aristoteles, *Nicomachean Ethics*) memberi perhatian pada karakter pendidik, tetapi memerlukan kerangka kelembagaan yang menopang pembiasaan kebajikan secara konsisten. Situational ethics Fletcher (Fletcher, 1966) menawarkan fleksibilitas berbasis kasih, namun dapat melemahkan standar baku jika tidak diatur dengan prosedur yang jelas. Di sisi lain, *ethic of care* Noddings (Noddings, 2013) memperkuat dimensi relasional, tetapi membutuhkan integrasi dengan kebijakan struktural agar tidak berhenti pada level interpersonal.

Sekolah Indonesia membutuhkan sebuah model integratif yang mampu menggabungkan kelima pendekatan tersebut ke dalam kerangka yang sistematis dan operasional. Narrative systematic review menunjukkan bahwa tanpa integrasi lintas-teori, implementasi etika di sekolah cenderung berat sebelah: terlalu normatif, terlalu konsekuensial, atau terlalu berorientasi karakter. Karena itu, pembahasan ini mengembangkan Model Integrasi Etika 4-

Layer, yang menghubungkan prinsip filosofis, kebijakan kelembagaan, prosedur operasional, dan praktik pembelajaran, sehingga etika tidak hanya menjadi wacana moral, tetapi bekerja secara struktural.

Model 4-Layer Integrasi Etika Sekolah

a. Layer 1: Prinsip Etika (Etical Principles Layer)

Layer paling dasar memuat lima kelompok teori etika utama. Deontologi Kantian digunakan untuk merumuskan kewajiban dasar guru seperti kejujuran akademik, penghormatan terhadap otonomi murid, dan larangan diskriminasi. Utilitarianisme Mill mendukung pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak luas terhadap komunitas sekolah, misalnya dalam kebijakan penggunaan CCTV, kamera ruang kelas, atau pembatasan penggunaan gawai. Etika kebajikan Aristoteles memfokuskan pembentukan karakter pendidik—keteladanan, moderasi, keadilan, dan kebijaksanaan praktis (*phronesis*) sebagai inti profesionalitas guru. Etika situasional Fletcher memberi ruang evaluasi kasus per kasus, khususnya dalam penanganan isu sensitif seperti perundungan digital atau kebocoran data murid. Terakhir, *ethic of care* Noddings menegaskan nilai empati, kehadiran emosional, dan relasi timbal balik sebagai dimensi yang sering kali hilang dalam kerangka etika formal.

Integrasi kelima prinsip ini bertujuan menciptakan kerangka etika yang lebih proporsional: aturan menjaga konsistensi, manfaat memastikan keadilan, kebajikan menjaga karakter guru, sensitivitas situasional memastikan relevansi konteks, dan *care* memastikan dimensi kemanusiaan tidak hilang dalam regulasi.

b. Layer 2: Kebijakan Institusional (Ethical Policy Layer)

Layer kedua memetakan bagaimana prinsip-prinsip etika diterjemahkan ke dalam kebijakan sekolah. Pertama adalah Kode Etik Guru Indonesia, yang memuat standar normatif dasar seperti kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Kedua, kebijakan integritas akademik mencakup pedoman anti-plagiarisme, aturan penggunaan AI seperti ChatGPT, dan standar publikasi karya ilmiah siswa. Ketiga, kebijakan privasi data dan keamanan digital penting untuk melindungi data murid dari aplikasi EdTech, sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Keempat, pedoman penggunaan media sosial dibutuhkan

untuk mengatur batas profesional guru, interaksi dengan murid, serta pencegahan penyebaran hoaks atau konten tidak etis.

Kebijakan-kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi dirancang agar selaras dengan prinsip etika di Layer 1. Kebijakan menjadi jembatan antara teori dan praktik: cukup tegas untuk mengarahkan perilaku, namun cukup fleksibel untuk diterapkan dalam situasi nyata yang dinamis.

c. Layer 3: Prosedur Operasional (Ethical Procedures Layer)

Layer ini mengoperasionalkan kebijakan menjadi teknis yang dapat dijalankan. SOP penilaian objektif memastikan evaluasi murid bebas bias. Uji orisinalitas dengan perangkat anti-plagiarisme atau pengawasan penggunaan AI menjaga integritas akademik. Persetujuan orang tua (parental consent) penting terutama terkait penggunaan aplikasi digital, dokumentasi murid, atau eksperimen pembelajaran. Data Protection Impact Assessment (DPIA) sederhana digunakan sekolah untuk menilai risiko privasi sebelum mengadopsi aplikasi EdTech tertentu—sebuah adaptasi pendidikan dari standar etika teknologi internasional.

Prosedur ini memberikan kejelasan operasional yang sering kali hilang dalam kebijakan yang terlalu abstrak. Ia berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas, memastikan bahwa etika tidak hanya dinyatakan tetapi diimplementasikan.

d. Layer 4: Praktik Profesional Guru dan Sekolah (Ethical Practice Layer)

Layer terakhir adalah implementasi nyata di kelas. Pembelajaran berbasis dilema moral digunakan untuk mengembangkan penalaran moral siswa. Rubrik keadilan penilaian membantu guru reflektif terhadap bias, baik gender, sosial, maupun akademik. Pelatihan guru berbasis etika digital memperkuat kemampuan menghadapi isu seperti plagiarisme berbasis AI, manipulasi foto, deepfake, dan cyberbullying. Simulasi kasus etika AI—misalnya bagaimana menilai tugas yang dibuat dengan bantuan LLM—membantu guru membuat keputusan yang adil dan proporsional.

Pada level ini, kelima teori etika diuji dalam kenyataan. Guru harus menyeimbangkan aturan (deontologi), konsekuensi (utilitarianisme), pembentukan karakter (kebajikan), konteks kasus (situasional), dan empati (care). Layer 4 merupakan lapangan etika yang sesungguhnya.

Dialog dengan Literatur Etika Klasik–Kontemporer

Model ini menunjukkan konsistensi sekaligus batasan dari teori-teori etika yang dirujuk. Kant relevan untuk merumuskan kewajiban profesional, tetapi tidak memadai untuk menghadapi dilema digital yang kompleks seperti penggunaan algoritma prediktif. Sebaliknya, Mill memberikan kerangka kalkulasi manfaat-risiko, namun berpotensi mengabaikan perlindungan individu jika diterapkan tanpa batasan. Aristoteles menekankan kebajikan karakter guru, namun pembiasaan kebajikan membutuhkan institusi yang mendukung. Fletcher menawarkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan moral, tetapi harus dibatasi oleh standar prosedural agar tidak menimbulkan relativisme. Noddings memperkuat relasi emosional guru–murid, tetapi tidak cukup untuk menangani persoalan seperti keamanan data atau standar penilaian.

Model 4-Layer mengatasi keterbatasan masing-masing teori dengan memadukan kekuatannya dalam empat struktur operasional sekolah. Dengan demikian, model ini bukan hanya sintesis teoretis, tetapi kerangka kerja praktis.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Praktis: “Policy Pack Etika Digital Sekolah”

Berdasarkan integrasi tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah Policy Pack Etika Digital Sekolah yang dapat digunakan oleh sekolah pada semua jenjang. Paket kebijakan ini mencakup:

1. Pedoman Etika Digital dan AI
 - o Penggunaan AI generatif dalam pembelajaran
 - o Standar deteksi plagiarisme digital
 - o Tata cara penggunaan perangkat dan platform EdTech
2. Kebijakan Data Privacy Sekolah
 - o DPIA sederhana untuk aplikasi digital
 - o Formulir persetujuan orang tua
 - o Manajemen data murid dan pelaporan insiden
3. Panduan Penilaian Berbasis Integritas
 - o Rubrik penilaian etis
 - o SOP penilaian objektif
 - o Pedoman uji orisinalitas
4. Modul Pelatihan Guru: Etika AI dan Dilema Digital
 - o Studi kasus deepfake, misuse AI, manipulasi tugas

- o Praktik pembelajaran berbasis dilema moral

Policy Pack ini berfungsi sebagai alat implementatif dari Model 4-Layer, menjembatani teori moral klasik, etika kontemporer, dan kebutuhan etika digital sekolah Indonesia masa kini.

Implikasi Praktis dan Kebijakan

Hasil narrative systematic review menunjukkan bahwa integrasi teori etika klasik dan kontemporer hanya akan efektif apabila diterjemahkan ke dalam kebijakan dan prosedur yang operasional, terukur, dan dapat diawasi. Kompleksitas etika pendidikan Indonesia—terutama dalam isu privasi digital, pemanfaatan AI generatif, keadilan penilaian, dan profesionalitas guru—menuntut tindakan konkret yang dapat diimplementasikan sekolah tanpa menunggu perubahan regulasi nasional. Implikasi berikut dirumuskan untuk mendukung sekolah dalam mengadopsi Model Integrasi Etika 4-Layer melalui seperangkat langkah praktis dan kebijakan institusional.

1. Kebijakan AI di Kelas yang Terstruktur dan Transparan

Sekolah perlu mengembangkan pedoman internal terkait penggunaan AI generatif oleh siswa dan guru secara izin-bersyarat, bukan larangan total. Setiap penggunaan AI harus mencantumkan disclosure—misalnya pernyataan “dibantu oleh AI” dalam tugas. Guru menerapkan uji orisinalitas melalui perangkat antiplagiarisme dan asesmen autentik seperti proyek kontekstual yang tidak mudah digantikan oleh AI. Dengan demikian, sekolah menjaga integritas akademik tanpa menutup akses terhadap teknologi pembelajaran baru.

2. Standar Operasional Privasi Data (Privacy-by-Design)

Prosedur pengelolaan data siswa perlu dirancang berdasarkan prinsip privacy-by-design: pengumpulan minimal data, pembatasan akses berbasis peran (role-based access), dan enkripsi untuk data sensitif. Setiap aplikasi EdTech wajib melalui pemeriksaan risiko sederhana (DPIA sekolah) sebelum dipakai. Langkah ini mengurangi potensi kebocoran data murid dan meningkatkan akuntabilitas sekolah.

3. Rubrik Integritas Akademik dan Kontrak Belajar

Untuk mencegah plagiarisme dan manipulasi digital, sekolah memerlukan rubrik integritas akademik yang baku—mengatur plagiarisme, penggunaan sumber,

penggunaan AI, dan kolaborasi. Rubrik ini dilengkapi kontrak belajar yang ditandatangani guru–siswa pada awal semester, sehingga norma moral tidak hanya diucapkan, tetapi diberi konsekuensi akademik yang jelas. Selain itu, guru perlu melatih siswa membaca jejak digital dan memahami konsekuensi etika dari tindakan akademik mereka.

4. Pelatihan Guru Berbasis Dilema Etika dan Simulasi AI

Guru membutuhkan kompetensi baru untuk menangani kasus digital seperti deepfake, cyberbullying, atau tugas berbasis AI. Sekolah dapat mengadakan simulasi kasus (misalnya: apakah tugas siswa sah jika dibuat dengan LLM?) dan pelatihan dilema etika berbasis pendekatan Kantian, utilitarian, kebajikan, situasional, dan care. Pelatihan semacam ini memperkuat kemampuan reflektif dan penilaian moral guru, serta memastikan implementasi Model 4-Layer berjalan konsisten.

5. Pembentukan Komite Etik Sekolah

Sekolah dianjurkan membentuk Komite Etik yang berfungsi sebagai ruang konsultasi, mediasi, dan audit etika ringan per semester. Komite ini menilai kepatuhan terhadap kebijakan privasi, integritas akademik, penilaian adil, dan penggunaan AI. Laporan audit menjadi bahan refleksi untuk perbaikan kebijakan serta alat pertanggungjawaban publik internal.

6. Penguatan Kebijakan Media Sosial Guru-Murid

Interaksi guru–murid di platform digital perlu diatur melalui pedoman media sosial yang menegaskan batas profesional, larangan mengunggah gambar murid tanpa izin, serta etika komunikasi publik. Kebijakan ini membantu menjaga integritas relasi edukatif dan melindungi murid dari eksploitasi digital.

7. Asesmen Autentik dan Proyek Kontekstual

Untuk mengurangi peluang kecurangan berbasis AI, guru dapat menerapkan asesmen autentik berupa proyek berbasis konteks lokal, wawancara, eksperimen, atau portofolio proses. Dengan demikian, integritas akademik tidak bergantung pada pengawasan teknologi semata, tetapi pada desain penilaian yang lebih humanistik dan kreatif.

8. Edukasi Literasi Digital Siswa

Sekolah perlu menyisipkan modul literasi digital yang mencakup privasi data, jejak digital, perilaku etis di media sosial, dan risiko penyalahgunaan AI. Literasi ini menjadi fondasi karakter siswa dalam menghadapi ekosistem digital.

9. Mekanisme Pelaporan Aman (Safe Reporting Channel)

Siswa dan guru harus memiliki saluran aman dan anonim untuk melaporkan pelanggaran etika seperti kebocoran data, manipulasi nilai, atau penyalahgunaan AI.

10. Integrasi Etika ke Rencana Kerja Sekolah

Agar berkelanjutan, semua kebijakan etika perlu masuk ke RKS/RKAS, sehingga mendapatkan dukungan anggaran dan pengawasan resmi.

Keterbatasan dan Riset Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan. Pertama, desain narrative systematic review berpotensi menghasilkan bias interpretatif, karena sintesis bergantung pada penilaian konseptual peneliti dan tidak menggunakan teknik meta-analitik kuantitatif. Kedua, terdapat kemungkinan bias publikasi, mengingat sebagian besar artikel yang diakses berasal dari jurnal nasional terindeks SINTA dan database internasional yang cenderung lebih mempublikasikan studi dengan hasil positif, sementara laporan praktik lapangan yang bersifat negatif atau konflik etis sering tidak terdokumentasi. Ketiga, jumlah studi intervensi empiris di sekolah Indonesia terkait etika digital, etika AI, dan penerapan teori etika masih sangat terbatas; sebagian besar literatur bersifat konseptual atau deskriptif sehingga membatasi kedalaman analisis kausal.

Agenda riset lanjutan karenanya perlu diarahkan pada uji coba empiris Model Integrasi Etika 4-Layer di berbagai konteks, misalnya sekolah negeri, swasta, dan madrasah, untuk menilai kelayakan implementasi di lapangan. Selain itu, diperlukan pengembangan metrik integritas akademik, termasuk indikator plagiarisme digital, keadilan penilaian, dan literasi etika AI. Penelitian lebih lanjut juga dapat memasukkan audit kebijakan AI sekolah, mengevaluasi kualitas DPIA sederhana, dan menilai dampaknya terhadap iklim sekolah, termasuk rasa aman, transparansi, dan kualitas relasi guru–murid. Dengan demikian, penelitian masa depan dapat memperkuat bukti empiris atas kerangka etika yang direkomendasikan

kesimpulan

Kajian ini menjawab tiga pertanyaan riset dengan menunjukkan bahwa penerapan teori

etika dalam pendidikan Indonesia membutuhkan pendekatan integratif yang menghubungkan aturan normatif, orientasi kemanfaatan, pembentukan karakter, sensitivitas konteks, dan relasi kepedulian. Pertama, hasil review menunjukkan bahwa tidak ada satu teori etika—baik deontologi, utilitarianisme, etika kebajikan, etika situasional, maupun care ethics—yang mampu secara mandiri menangani kompleksitas dilema moral di sekolah. Karena itu, integrasi lintas-teori diperlukan agar kebijakan dan praktik pendidikan dapat menjaga konsistensi aturan sekaligus fleksibel menghadapi situasi baru, terutama yang berkaitan dengan dunia digital dan kecerdasan buatan. Kedua, isu etika digital seperti plagiarisme daring, pelanggaran privasi data, penyalahgunaan AI generatif, dan ketimpangan literasi teknologi terbukti menjadi tantangan yang paling krusial dalam konteks sekolah Indonesia, sehingga menuntut pedoman dan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis.

Dalam konteks tersebut, Model Integrasi Etika 4-Layer yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka komprehensif yang menghubungkan prinsip–kebijakan–prosedur–praktik secara runtut. Model ini memungkinkan sekolah menyelaraskan nilai moral dasar dengan kebijakan operasional, instrumen prosedural, dan strategi pedagogis konkret. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi kebutuhan mendesak akan pendekatan etika pendidikan yang lebih adaptif, responsif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada pembentukan ekosistem sekolah yang aman, adil, dan berintegritas. Model 4-Layer dapat berfungsi sebagai pedoman bagi perumus kebijakan, pendidik, dan peneliti untuk mengembangkan tata kelola etika yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Semua sumber yang dirujuk atau dikutip dalam naskah harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, semua sumber dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam naskah.

Minimal daftar pustaka adalah 20 sumber dari hasil-hasil penelitian, gagasan, teori atau konsep yang telah diterbitkan di jurnal, baik cetak maupun elektronik.

Sumber dari buku tidak lebih dari 15% dari total daftar pustaka. Acuan yang dirujuk merupakan hasil publikasi 10 tahun terakhir, terkecuali acuan klasik yang digunakan sebagai bahan kajian historis.

Penulis perlu mengutip artikel yang diterbitkan Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, minimal 2 artikel.

Penulisan daftar pustaka **WAJIB menggunakan Mendeley** dan mengikuti ketentuan

penulisan rujukan sistem **APA edisi ke-7**. (lihat: https://drive.google.com/file/d/1sg9LU-WHkd_rBbtmabTOsw7G75fQvnLA/view?usp=sharing)

Daftar pustaka ditulis dengan jenis huruf Book Antiqua ukuran 10pt spasi 1.